

Menggugat Ilusi Pendidikan Gratis di Indonesia

Category: KOLOM

written by Redaksi | April 26, 2026



SEANTERONEWS.com – Narasi tentang “[pendidikan gratis](#)” sering kali menjadi jualan politik yang manis bagi para penguasa. Namun, bagi masyarakat di pelosok desa seperti Namorambe, narasi tersebut kerap terasa jauh dari realita. Di lapangan, akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera bukanlah tentang kemudahan, melainkan perjuangan melawan ilusi biaya yang masih menghantui.

Pemerintah memang telah menghapus biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), namun kebijakan tersebut sering kali menjadi solusi setengah hati. Mengapa? Karena sekolah bukan sekadar SPP.

Jebakan “Biaya Perintilan”

Bagi petani atau pekerja harian dengan penghasilan tidak menentu, pendidikan gratis hanyalah permukaan. Di balik itu,

terdapat sederet “biaya perintilan” yang membentang luas: mulai dari seragam, sepatu, buku tulis, hingga ongkos transportasi harian.

Dalam skala rumah tangga petani kecil, setiap rupiah dihitung dengan cermat demi memastikan ketersediaan pangan di atas meja makan. Ketika orang tua dipaksa memilih antara membeli buku sekolah atau membeli beras, insting bertahan hidup akan selalu memenangkan kebutuhan pokok. Pendidikan akhirnya tersingkir, bukan karena kurangnya keinginan untuk pintar, melainkan karena keterbatasan ekonomi yang tidak memberikan ruang untuk pilihan lain.

Kebijakan yang disusun di ruang ber-AC sering kali gagal menyentuh realitas tanah becek tempat rakyat kecil berjuang. Inilah retakan sistemik yang perlu segera ditambah.

Dampak Sistemik: Memutus Motivasi Generasi

Ketidaksiapan pemerintah dalam menjamin pendidikan yang benar-benar aksesibel menciptakan siklus kemiskinan yang mematikan motivasi. Banyak anak di tingkat sekolah menengah terpaksa putus sekolah karena melihat kenyataan hidup orang tuanya yang membanting tulang namun tetap terjebak dalam kesulitan ekonomi.

Muncul stigma, “Buat apa sekolah tinggi jika ujungnya tetap susah?”

Hasilnya, generasi muda kehilangan arah. Tanpa ijazah dan keterampilan yang memadai, mereka terjerumus ke dalam gaya hidup tanpa tujuan, terjebak menjadi buruh serabutan, atau mengikuti jejak kemiskinan orang tuanya. Mimpi untuk memperbaiki nasib melalui pendidikan pun kandas sebelum sempat dimulai.

Kegagalan Moral dan Administratif

Jika kita menengok negara tetangga seperti Malaysia atau Singapura, "[gratis](#)" di sana dimaknai dengan tanggung jawab negara yang total. Mereka menjamin akses tanpa membebankan biaya tersembunyi kepada orang tua murid.

Di Indonesia, kita menghadapi ironi yang menyakitkan. Di saat anggaran negara seharusnya diprioritaskan untuk subsidi pendidikan atau bantuan biaya hidup bagi siswa dari keluarga miskin, dana tersebut sering kali bocor oleh praktik korupsi pejabat. Ini bukan hanya kegagalan administratif, melainkan kegagalan moral. Bagaimana negeri ini bisa maju jika pondasi manusianya dibiarkan rapuh oleh ketimpangan?

Pendidikan sebagai Hak, Bukan Komoditas

Sudah saatnya pemerintah berhenti bersembunyi di balik kata "[gratis](#)". Jika memang ingin serius merangkul siswa dari keluarga prasejahtera, intervensi negara harus bersifat total:

Bantuan Biaya Hidup: Pendidikan gratis harus dibarengi dengan bantuan biaya hidup agar siswa tidak terpaksa mencari uang dan meninggalkan sekolah.

Sistem Pendataan Tepat Sasaran: Perbaiki data diperlukan agar bantuan menyasar mereka yang benar-benar tersisih, bukan hanya mereka yang memiliki akses terhadap birokrasi.

Hapus Biaya Tersembunyi: Kebijakan yang menjamin seluruh atribut sekolah tersedia tanpa biaya bagi siswa tidak mampu.

Pendidikan yang berkualitas adalah satu-satunya tangga bagi rakyat miskin untuk keluar dari kubangan kemiskinan. Jika tangga tersebut dipatahkan oleh sistem yang tidak berempati, maka masa depan negeri ini akan terus suram.

Negara harus memiliki hati. Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara, bukan sekadar komoditas politik untuk menjaga

citra. Jangan biarkan siklus kebodohan dan kemiskinan ini terus berulang dari generasi ke generasi.